

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Pelajar merupakan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang formal, baik di sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelajar merupakan bagian dari peserta didik yang memiliki hak memperoleh pendidikan guna mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam perspektif pembangunan manusia, pelajar menempati posisi strategis karena mereka diproyeksikan sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan memiliki kecerdasan, keterampilan, serta akhlak yang baik. Namun dalam praktik kehidupan sosial, pelajar tidak sepenuhnya terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan perkembangan, termasuk potensi munculnya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu proses pembentukan karakter mereka.

Sebagian besar pelajar pada jenjang pendidikan menengah berada pada fase remaja, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan sosial. Santrock (2011) menjelaskan bahwa remaja merupakan individu berusia 12–21 tahun yang sedang mengalami perubahan besar dalam perkembangan biologis, kognitif, dan sosial. Pada tahap perkembangan ini, remaja memiliki kecenderungan untuk mencari identitas diri dan memperoleh pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Hurlock (1991) menyebut fase ini sebagai masa pencarian identitas, di mana individu sering mencoba berbagai perilaku sebagai bagian dari proses pembentukan jati diri. Kondisi tersebut menyebabkan

remaja relatif lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Kerentanan pada masa remaja tersebut sering kali termanifestasi dalam bentuk perilaku menyimpang yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Kartono (2005) mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang atau delinkuen yang melanggar norma sosial maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sarwono (2010) menjelaskan bahwa kenakalan remaja sering kali muncul sebagai bentuk ekspresi dari konflik psikologis, frustrasi, maupun kegagalan remaja dalam menemukan saluran aktualisasi diri yang positif. Dalam praktiknya, bentuk kenakalan remaja sangat beragam, mulai dari pelanggaran disiplin ringan hingga tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling menonjol dan berulang di Indonesia adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar merupakan perkelahian massal antar kelompok pelajar yang umumnya dilakukan secara sengaja dan terorganisasi. Konflik semacam ini sering dipicu oleh rivalitas antarsekolah, solidaritas kelompok, maupun provokasi yang berkembang melalui media sosial. Fenomena ini kerap melibatkan senjata tajam dan berpotensi menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2022) mencatat lebih dari 202 kasus tawuran pelajar dalam satu tahun, sementara di Jawa Tengah terjadi peningkatan kasus setelah aktivitas pendidikan kembali normal pascapandemi. Data ini menunjukkan bahwa tawuran pelajar telah berkembang dari sekadar konflik antar kelompok remaja menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pemahaman terhadap fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan individu dengan lingkungan sosial melemah. Travis Hirschi (1969) melalui teori kontrol sosial (*social control theory*) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial individu terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat mengalami pelemahan. Ikatan sosial tersebut terdiri atas empat elemen utama, yaitu *attachment, commitment, involvement, dan belief*. Pelemahan pada keempat elemen tersebut meningkatkan peluang individu untuk terlibat dalam perilaku delinkuen.

Dimensi situasional dari fenomena ini dijelaskan oleh Cohen dan Felson (1979) melalui *Routine Activity Theory*. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan, yaitu pelaku yang termotivasi, sasaran yang rentan, dan ketiadaan pengawas yang efektif (*capable guardian*). Dalam konteks ini, tawuran pelajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lemahnya kontrol sosial serta celah pengawasan dalam ruang dan waktu tertentu. Kedua perspektif teoritis ini secara bersama-sama menjelaskan mengapa tawuran pelajar tidak hanya terjadi, tetapi juga berulang dengan pola lokasi dan waktu yang relatif konsisten dari tahun ke tahun.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut mempercepat penyebaran fenomena tawuran pelajar. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang provokasi, mobilisasi massa, serta ajang eksistensi bagi kelompok pelajar. Berbagai rekaman video tawuran sering kali dengan cepat tersebar melalui platform digital dan memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, viralitas tersebut justru memicu efek imitasi di kalangan remaja lain yang terdorong melakukan tindakan serupa untuk memperoleh

pengakuan sosial. Kondisi ini menyebabkan fenomena tawuran pelajar tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, tetapi dapat dengan cepat menyebar dan memicu konflik serupa di daerah lain.

Skala regional menunjukkan Provinsi Jawa Tengah turut menghadapi dinamika serupa terkait meningkatnya kasus tawuran pelajar. Data Polda Jawa Tengah (2023) mencatat ratusan kasus tawuran terjadi sepanjang satu tahun terakhir di berbagai kabupaten dan kota. Peningkatan ini terutama terlihat setelah berakhirnya pembatasan aktivitas sosial pada masa pandemi COVID-19, ketika kegiatan sekolah kembali berlangsung secara tatap muka dan interaksi sosial antar pelajar meningkat. Beberapa wilayah bahkan dikenal sebagai titik rawan tawuran, khususnya di kawasan dengan mobilitas tinggi seperti jalur penghubung antarkota dan daerah penyangga kawasan perkotaan. Sehingga fenomena tawuran pelajar perlu dilihat tidak hanya pada level individu atau kelompok, tetapi juga dalam konteks wilayah yang memiliki dinamika sosial tertentu.

Fenomena tawuran pelajar di Jawa Tengah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai muncul secara signifikan di wilayah kabupaten. Kabupaten Kendal merupakan bagian dari kawasan metropolitan Kedungsepur (Kendal–Demak–Ungaran–Semarang–Purwodadi) yang mengalami perkembangan pesat dalam sektor industri, mobilitas penduduk, serta pertumbuhan kawasan perkotaan. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat industrialisasi tidak selalu diimbangi dengan kesiapan sistem pengawasan sosial terhadap remaja. Kondisi tersebut secara teoritis membuka ruang bagi munculnya

kelompok pelajar berorientasi kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif kontrol sosial Travis Hirschi.

Kelompok gangster remaja di Kendal menunjukkan karakteristik yang kompleks dan lintas latar belakang. Anggotanya berasal dari rentang usia 13 hingga 20 tahun dengan latar belakang sosial yang beragam, mulai dari pelajar SMP, pelajar SMA, anak putus sekolah, hingga yang telah bekerja. Status sosial ekonomi mereka pun tidak homogen, mencakup anak pejabat, buruh bangunan, karyawan, hingga keluarga pekerja migran. Fakta ini menegaskan bahwa fenomena tawuran pelajar tidak dapat disederhanakan sebagai masalah kemiskinan semata, melainkan merupakan ekspresi dari melemahnya ikatan sosial dan menguatnya identitas kelompok sebaya yang berorientasi kekerasan, sebagaimana diprediksikan oleh teori kontrol sosial.

Fenomena tawuran pelajar di Kabupaten Kendal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, baik dari segi frekuensi kejadian maupun tingkat kekerasan yang ditimbulkan. Berdasarkan rekapitulasi pemberitaan media nasional dan lokal, kasus tawuran pelajar tercatat terjadi secara berulang pada tahun 2018 hingga 2025 dengan total sembilan kasus besar. Puncak eskalasi terjadi pada tahun 2023, di mana tiga kasus tawuran besar melibatkan puluhan pelajar dan penggunaan senjata tajam. Pola ini mengindikasikan bahwa tawuran pelajar di Kendal bukanlah peristiwa insidental, melainkan fenomena berulang yang menunjukkan kegagalan pencegahan jangka panjang.

Tawuran pelajar di Kendal tidak hanya menimbulkan korban langsung, tetapi juga berdampak luas terhadap rasa aman masyarakat. Banyak kejadian

berlangsung di jalan umum, SPBU, dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat sipil berpotensi menjadi korban salah sasaran. Viralitas video tawuran di media sosial semakin memperparah situasi, karena memperluas eksposur kekerasan sekaligus memicu imitasi di kalangan remaja lain. Dalam kondisi ini, tawuran tidak hanya menjadi masalah pelajar, tetapi telah berubah menjadi ancaman nyata terhadap ketertiban umum.

Eskalasi kekerasan juga menjangkau usia yang semakin muda. Pada Januari 2025, dilaporkan adanya tawuran yang melibatkan pelajar SMP dari Kendal dan Semarang di wilayah Kaliwungu, dengan pelaku membawa senjata tajam berukuran besar (Tribun Banyumas, 2025). Fakta keterlibatan pelajar SMP dengan penggunaan senjata tajam tersebut menunjukkan indikasi melemahnya kontrol sosial, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Pada periode yang berdekatan, tawuran yang melibatkan puluhan pelajar SMA dengan membawa senjata tajam juga terjadi dan mengakibatkan korban luka yang memerlukan perawatan medis (HaloSemarang, 2024). Selain itu, dalam salah satu kasus, aksi tawuran yang melibatkan senjata tajam terjadi pada dini hari dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut juga terekam dan beredar luas di media sosial, menunjukkan bahwa fenomena tawuran tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga memiliki dimensi penyebaran informasi yang luas di ruang digital (iNews Pantura, 2025).

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tawuran pelajar di Kabupaten Kendal tidak hanya bersifat insidental, tetapi telah berkembang dengan pola yang lebih berisiko, ditandai dengan penggunaan senjata tajam serta

munculnya korban luka hingga meninggal dunia. Perbandingan faktual menunjukkan perbedaan karakter tawuran pelajar antarwilayah.

Kondisi ini berbeda dengan sejumlah kasus di wilayah lain. Sejumlah laporan media mencatat bahwa kasus di Tegal dan Banyumas lebih sering berupa bentrokan spontan tanpa keterlibatan senjata tajam. Tribun Jateng (2024) menyebut bahwa *“tawuran pelajar di Tegal berhasil dibubarkan sebelum terjadi bentrokan fisik.”* Kondisi tersebut kontras dengan pola di Kendal yang kerap melibatkan senjata tajam seperti celurit, parang, atau pedang serta menimbulkan korban luka. Situasi tersebut memperkuat kebutuhan akan penanganan institusional yang lebih intensif dan terkoordinasi

Eskalasi tersebut menempatkan aparat kepolisian pada posisi strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Kendal secara normatif telah melakukan berbagai upaya, seperti patroli rutin, razia senjata tajam, serta pembinaan terhadap pelajar. Namun demikian, fakta bahwa tawuran masih terus berulang menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitas penanganan yang dilakukan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar telah berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek pencegahan dan deteksi dini.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan upaya penanganan, tetapi juga pada kesesuaian antara strategi yang diterapkan dengan dinamika fenomena tawuran yang terus berkembang. Perubahan pola tawuran yang semakin terorganisir, melibatkan senjata tajam, serta dipengaruhi

oleh media sosial menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai eskalasi fenomena tersebut sekaligus menilai efektivitas penanganan yang dilakukan, diperlukan analisis yang didasarkan pada data empiris dari berbagai sumber yang relevan..

Secara empiris, gambaran eskalasi tawuran pelajar di Kabupaten Kendal dapat dipahami melalui dua sumber data yang berbeda: pemberitaan media dan laporan resmi kepolisian. Kedua sumber ini perlu dibaca secara paralel karena memiliki cakupan yang berbeda. Data media hanya mencerminkan kejadian yang cukup menonjol untuk mendapat liputan publik, sementara data kepolisian mencakup seluruh laporan dan pengaduan yang masuk, termasuk kejadian yang tidak diberitakan.

Berdasarkan rekapitulasi pemberitaan dari berbagai media nasional dan lokal, tercatat setidaknya sembilan kasus tawuran pelajar yang mendapat liputan media dalam periode 2018 hingga 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tawuran Pelajar di Kabupaten Kendal

Tahun	Jumlah Kasus Tawuran Pelajar
2018	1
2022	1
2023	3
2024	2
2025	2
Total	9

Sumber: Rekapitulasi Liputan Media, (2018–2025)

Berdasarkan tabel tersebut, kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Puncak eskalasi terjadi pada tahun 2023 dengan tiga kasus besar yang melibatkan puluhan pelajar dan penggunaan senjata tajam. Lokasi kejadian yang berulang juga mengindikasikan bahwa titik-titik rawan tawuran relatif konsisten dari tahun ke tahun, yang sekaligus menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu memutus rantai kekerasan di wilayah tersebut. Gambaran yang jauh lebih komprehensif diperoleh dari data laporan resmi kepolisian pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Laporan Resmi Tawuran Pelajar yang Diterima Polres Kendal

Tahun	Jumlah LP/Pengaduan Resmi	Karakteristik Utama
2024	12 Laporan	Tersebar di Gemuh, Pegandon, Patean, Patebon, Kaliwungu, Singorojo; dominan terjadi pukul 01.00–03.30 WIB
2025	10 Laporan	Tersebar di Brangsong, Gemuh, Patebon, Cepiring, Sukorejo; modus dominan penguasaan senjata tajam dan pengeroyokan; satu kasus mengakibatkan korban meninggal dunia

Sumber: Data Kasus Tawuran Laporan Polres Kendal

Berdasarkan Data Kasus Tawuran Polres Kendal (Juni 2024) tercatat setidaknya 12 laporan polisi dan pengaduan resmi yang diterima sepanjang periode yang terdokumentasi, mencakup kasus tawuran pelajar maupun tindakan yang berkaitan langsung dengan persiapan tawuran seperti konvoi remaja bersenjata pada dini hari dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Kasus-kasus tersebut tersebar di

berbagai kecamatan, antara lain Gemuh, Pegandon, Patean, Patebon, Kaliwungu, dan Singorojo, dengan jam kejadian yang dominan antara pukul 01.00 hingga 03.30 WIB. Angka ini jauh melampaui dua kasus yang terekspose media pada tahun yang sama, memperlihatkan bahwa sebagian besar kejadian tidak sampai ke ruang publik.

Ketimpangan antara data media dan data laporan resmi ini memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, skala permasalahan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan pemberitaan. Kedua, tingginya jumlah laporan dan pengaduan yang masuk ke Polres Kendal mencerminkan keresahan nyata masyarakat. Masyarakat yang secara aktif melaporkan kejadian atau potensi tawuran bahkan untuk kejadian yang tidak sampai diberitakan media merupakan indikator konkret bahwa gangguan keamanan ini telah dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Keresahan tersebut beralasan dan dapat dipahami secara faktual. Sebagian besar kejadian tawuran berlangsung di ruang publik yang sehari-hari digunakan masyarakat umum, seperti jalan raya, jalan lingkar, kawasan SPBU, dan area permukiman. Berdasarkan data laporan resmi kepolisian, sejumlah pelapor merupakan warga biasa dan pengendara yang secara tidak sengaja berpapasan dengan rombongan bersenjata pada dini hari. Kondisi ini menempatkan warga sipil pada posisi rentan sebagai korban salah sasaran, bukan hanya pelajar yang terlibat langsung dalam konflik.

Secara spasial, data kepolisian memperlihatkan konsentrasi kejadian pada titik-titik yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Menggunakan perspektif *Routine Activity Theory*, lokasi-lokasi yang dipilih memiliki karakteristik yang kondusif bagi terjadinya tawuran: merupakan jalur penghubung antarkecamatan dengan mobilitas tinggi, minim pencahayaan dan pengawasan pada malam hari, serta mudah dikosongkan dengan cepat saat aparat mendekat. Dari sisi temporal, kejadian dominan terjadi pada Jumat malam hingga dini hari, Sabtu malam, hari libur, serta momentum Ramadan, dengan sebagian kejadian didahului oleh kesepakatan tantangan melalui media sosial. Konsistensi pola waktu dan lokasi ini menegaskan bahwa tawuran bukan lagi konflik spontan, melainkan aksi terorganisir yang secara sistematis memanfaatkan celah pengawasan aparat.

Dari sisi institusi pendidikan, identifikasi internal menunjukkan bahwa siswa yang pernah terlibat dalam peristiwa tawuran berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP/MTs hingga SMA/SMK, dan tersebar di sejumlah sekolah di Kabupaten Kendal, antara lain SMK Harapan Mulya, SMK Bina Utama, SMK Muhammadiyah 3 Kendal, SMK N 3 Kendal, SMAN 1 Gemuh, dan berbagai sekolah lainnya. Penyebaran ini menunjukkan bahwa keterlibatan pelajar tidak terfokus pada satu institusi tertentu, melainkan bersifat lintas wilayah dan lintas jenjang pendidikan.

Kondisi tersebut menempatkan Polres Kendal pada posisi sentral sebagai institusi negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, kepolisian merupakan organisasi pelayanan publik yang menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penanganan tawuran pelajar bukan sekadar urusan pidana, tetapi merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik kepolisian yang harus dapat dinilai kinerjanya.

Dalam perspektif administrasi publik, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai organisasi pelayanan publik yang kinerjanya dapat dievaluasi melalui dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2006). Namun demikian, penerapan kerangka kinerja tersebut dalam konteks penanganan tawuran pelajar di tingkat kabupaten masih terbatas, sehingga belum diketahui secara komprehensif apakah berbagai upaya yang dilakukan telah mencerminkan kinerja yang optimal atau justru masih bersifat parsial dan reaktif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya mendeskripsikan upaya kepolisian, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kinerja publik.

Agus Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa kinerja organisasi publik dapat dinilai melalui lima dimensi utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dengan menggunakan kerangka ini, penilaian terhadap kinerja Polres Kendal tidak sekadar mengevaluasi jumlah penindakan yang dilakukan, tetapi juga menilai sejauh mana institusi kepolisian mampu merespons kebutuhan masyarakat akan rasa aman, menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Kinerja yang optimal seharusnya tercermin dari penurunan angka

kejadian secara berkelanjutan, bukan penanganan yang bersifat reaktif dan episodik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan tawuran pelajar di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan. Nugroho (2019) menemukan bahwa patroli intensif belum efektif mencegah tawuran karena minimnya koordinasi dengan sekolah, sementara Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa razia senjata tajam cenderung bersifat temporer tanpa menyentuh akar permasalahan. Wulandari (2022) juga mengungkap adanya dilema antara penindakan dan pembinaan yang menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut pada proses hukum. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada wilayah perkotaan besar dengan karakteristik sumber daya dan dinamika sosial yang berbeda. Temuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan fenomena tawuran pelajar di Kabupaten Kendal yang menunjukkan pola lebih terorganisir, melibatkan senjata tajam, serta terjadi pada ruang dan waktu yang spesifik.

Kesenjangan antara intensitas upaya yang telah dilakukan dengan masih berulangnya kasus tawuran menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan deskriptif. Diperlukan evaluasi kritis terhadap kinerja kepolisian untuk menilai apakah strategi yang diterapkan telah efektif, atau justru masih terbatas pada respons jangka pendek yang belum menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami fenomena tawuran pelajar, tetapi juga untuk menguji dan memperkaya kajian kinerja organisasi publik dalam konteks penanganan konflik sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah: “*Mengapa kinerja Polres Kendal belum efektif menghentikan berulangnya kasus tawuran pelajar?*” Pertanyaan ini akan dijawab dengan menelusuri dimensi kinerja kepolisian, serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penanganan tawuran pelajar di Kendal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Pola kejadian tawuran pelajar di Kabupaten Kendal menunjukkan repetisi yang konsisten dari sisi waktu, lokasi, dan modus kejadian.

Berdasarkan rekapitulasi pemberitaan media periode 2018–2025, tercatat sembilan kasus dengan puncak eskalasi pada 2023. Karakteristik yang serupa, seperti berlangsung pada malam hingga dini hari, di titik-titik tertentu, serta melibatkan pertemuan antar kelompok yang telah direncanakan. Pola yang berulang ini mengindikasikan bahwa tawuran pelajar bukan peristiwa insidental, melainkan fenomena yang memiliki keteraturan tertentu.

2. Dinamika ancaman tawuran pelajar ditandai dengan meningkatnya penggunaan senjata tajam dan tingkat kekerasan.

Berbagai kasus menunjukkan keterlibatan pelajar dalam penggunaan celurit, parang, dan senjata tajam lainnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya eskalasi dalam bentuk dan risiko kekerasan yang ditimbulkan, sehingga meningkatkan potensi korban luka berat hingga korban jiwa.

3. Pola penanganan yang dilakukan menunjukkan kecenderungan meningkat pada saat intensitas kasus atau perhatian publik sedang tinggi.

Penanganan oleh aparat kepolisian tampak lebih masif ketika kasus tawuran muncul ke permukaan atau menjadi perhatian luas, sementara pada kondisi normal intensitas penanganan tidak selalu terlihat konsisten. Hal ini

menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan konsistensi penanganan terhadap fenomena tawuran pelajar.

4. **Upaya preventif yang telah dilakukan belum mampu menghilangkan eksistensi kelompok tawuran pelajar secara berkelanjutan.** Meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, patroli, dan pembinaan, keberadaan kelompok-kelompok pelajar yang terlibat tawuran masih tetap ada dan terus memunculkan kejadian serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan dan belum efektif dalam memutus keberlanjutan fenomena tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang diberikan dalam bagian latar belakang, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerja Polres Kendal dalam penanganan dan pencegahan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerja Polres Kendal dalam penanganan dan pencegahan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait analisis kinerja organisasi pelayanan publik. Dengan menggunakan kriteria penilaian kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006) yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini memperluas penerapan teori tersebut pada konteks penanganan tawuran pelajar oleh institusi kepolisian di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pemahaman akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi publik sebagaimana diidentifikasi Ruky (dalam Hessel, 2005), seperti teknologi, kepemimpinan, budaya organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan literatur mengenai kinerja kepolisian sebagai organisasi pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Polres Kendal dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya dalam penanganan kasus tawuran pelajar. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung kinerja aparat, baik dari aspek internal seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengelolaan SDM, maupun dari aspek eksternal seperti dukungan teknologi dan kerja sama lintas sektor. Rekomendasi penelitian ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas upaya pencegahan, meningkatkan daya tanggap terhadap laporan masyarakat, serta menjamin keadilan dalam penindakan kasus. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kepolisian daerah lain yang menghadapi masalah serupa, sehingga mendorong perbaikan kinerja institusi kepolisian dalam kerangka administrasi publik secara lebih luas.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian (Novelty)
1	Penanganan Kenakalan Remaja Terkait Tawuran Oleh Polsek Pasar Minggu – FA Nouvalsukma, A Subowo. (2024)	Menganalisis kinerja kepolisian dalam menangani kasus tawuran pelajar	Teori Kinerja Publik	Kualitatif deskriptif	Kinerja belum optimal, khususnya pada dimensi efisiensi dan daya tanggap; terkendala SDM dan sarana	Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada kinerja kepolisian dalam penanganan tawuran, namun dilakukan pada lokus yang berbeda, yaitu Polres Kendal, sehingga memberikan konteks sosial dan karakteristik wilayah yang berbeda.

2	Kualitas Pelayanan Kepolisian Resor Tegal dalam Penanganan Tawuran Pelajar Di Kabupaten Tegal – Aripin, EL Setianingsih (2024)	Menganalisis kualitas pelayanan kepolisian dalam penanganan tawuran	Teori Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Kualitatif	Kinerja pelayanan belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan jumlah personel	Penelitian ini memperluas kajian tidak hanya pada aspek kualitas pelayanan, tetapi juga mencakup faktor pendukung dan penghambatnya.
3	Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya – Karana dkk. (2024)	Menilai efektivitas patroli presisi sebagai bentuk peningkatan kinerja kepolisian	Teori Efektivitas dan Daya Tanggap Kinerja Publik	Kualitatif deskriptif	Patroli presisi efektif mencegah tawuran, tetapi belum didukung sarana dan koordinasi yang kuat	Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas pada strategi patroli, tetapi juga mengkaji kinerja organisasi kepolisian secara komprehensif dalam konteks penanganan tawuran pelajar.

4	Predictive Policing: The Future of Crime Prevention Case Study of Children Brawl in the Jurisdiction of the South Jakarta Metro Police – Dirgala dkk. (2023)	Mengkaji penggunaan predictive policing dalam meningkatkan efektivitas pencegahan tawuran	Teori <i>Predictive Policing</i>	Kualitatif deskriptif (studi kasus)	Penggunaan teknologi membantu analisis konflik pelajar, namun pemanfaatannya belum belum efektif, ditunjukkan oleh peningkatan kasus tawuran; kendala meliputi keterbatasan SDM, sarana, metode kerja, dan anggaran	Penelitian terdahulu berfokus pada pendekatan teknologi <i>predictive policing</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji kinerja kepolisian secara langsung serta kesenjangan antara pendekatan berbasis teknologi.
5	Optimization of Predictive Policing Technology for Prevention of Brawling Crimes at Bekasi City Metro Police Station – Edco dkk. (2025)	Menganalisis efektivitas serta optimalisasi penerapan predictive policing dalam mencegah tindak pidana tawuran di	Teori Predictive Policing, Teori Evaluasi (CIPP), dan Analisis SWOT	Kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT	edictive policing memiliki potensi besar namun belum optimal karena lemahnya integrasi data, pendekatan masih reaktif, kurangnya partisipasi masyarakat,	Penelitian ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada implementasi langsung peran kepolisian di lapangan dalam menangani tawuran pelajar, bukan pada

		wilayah Polres Metro Bekasi Kota			keterbatasan teknologi, dan kurangnya pelatihan SDM	pendekatan berbasis teknologi seperti predictive policing.
6	Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman – Priyono (2023)	Menganalisis kinerja pegawai Satpol PP dalam memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat	Teori Kinerja Pegawai	Kualitatif deskriptif	Kinerja Satpol PP dinilai masih pada kategori cukup dan perlu ditingkatkan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap rasa aman dan nyaman	Penelitian ini memiliki objek yang berbeda, yaitu institusi kepolisian, serta fokus pada penanganan tawuran pelajar sebagai fenomena sosial.
7	Kinerja Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang – Laila & Hidayat (2020)	Menganalisis kinerja aparat dalam pengawasan peredaran minuman keras	Teori Kinerja Publik	Kualitatif deskriptif	Kinerja belum maksimal; kendala koordinasi dan serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan	Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menilai kinerja dalam konteks pengawasan administratif, tetapi menekankan pada penanganan konflik

						sosial berupa tawuran pelajar.
8	Analisis Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang – Grasia dkk. (2023)	Mengukur kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana	Teori Kinerja Publik	Kualitatif	Kinerja BPBD belum efisien dan daya tanggapnya rendah akibat keterbatasan sumber daya	Penelitian terdahulu berada pada sektor kebencanaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada sektor keamanan sosial.
9	Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai – Afrizal dkk. (2021)	Menilai kinerja instansi pelayanan publik dengan lima dimensi utama	Teori Kinerja Publik	Kuantitatif: survei & dokumentasi	Kinerja Sangat Baik Sekali. Saran penelitian hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menekankan analisis faktor pendukung dan penghambat kinerja kepolisian.
10	Organizational Commitment,	Menganalisis pengaruh	Teori Manajemen	Kuantitatif: regresi	Komitmen dan kompetensi	Penelitian ini tidak hanya mengkaji faktor

	Competence, Motivation, and Work Culture on Job Satisfaction and Performance of Kampar Police Bhabinkamtibmas – Wardana dkk. (2022)	komitmen organisasi, kompetensi, motivasi, dan budaya kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja Bhabinkamtibmas	SDM dan Kinerja (komitmen, kompetensi, motivasi, budaya kerja)		berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja; kompetensi justru berpengaruh negatif terhadap kinerja; variabel lain seperti motivasi, budaya kerja, dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja	internal SDM, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti dinamika sosial, pola tawuran pelajar, dan pemanfaatan teknologi.
11	Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak – Gebby Sintia	Mengetahui peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tawuran oleh anak di Kota Sorong	Teori hukum pidana, peran kepolisian, perlindungan anak, dan kenakalan remaja	Yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif melalui	Kepolisian berperan dalam pencegahan dan penanggulangan tawuran, hambatan meliputi kurangnya anggaran, keterbatasan personel, kurangnya	Penelitian ini berbeda karena lebih menekankan pada analisis mendalam pada aspek kinerja organisasi, termasuk efektivitas implementasi,

	Irawati dkk (2024)	serta hambatan yang dihadapi		wawancara, observasi, dan studi dokumentasi	perhatian orang tua, serta pengaruh pergaulan bebas di lingkungan sekolah	responsivitas, dan hambatan operasional dalam penanganan tawuran pelajar.
12	Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tawuran Remaja (Studi di Polrestabes Semarang) - Ratna Perwiratama dkk (2025)	Menganalisis peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar di Kota Semarang serta faktor penyebab dan wilayah rawan	Teori kenakalan remaja, kontrol sosial, peran kepolisian, serta hukum pidana dan perlindungan anak	Kualitatif dengan pendekatan empiris	Tawuran dipengaruhi faktor internal (krisis identitas, kontrol diri lemah) dan eksternal (lingkungan, keluarga, teman sebaya, media sosial); kepolisian melakukan upaya preventif dan represif, hambatan meliputi keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat	Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji peran kepolisian secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis spesifik terhadap faktor penyebab tawuran, pola kelompok (gangster), serta pengaruh media sosial dalam memicu konflik remaja.

13	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat – Yolanda & Suriadi (2024)	Menganalisis pengaruh produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas terhadap kinerja	Teori Kinerja Organisasi Publik	Kuantitatif	Produktivitas dan kualitas layanan berpengaruh signifikan; responsivitas tidak	Penelitian ini menambahkan analisis terhadap faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan dinamika kenakalan remaja.
14	Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) Pada Kantor Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong – Siti Fatimah (2024)	Mengetahui kinerja pegawai dalam pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) khususnya pembuatan surat pindah dan datang	Teori Manajemen Kinerja, Teori Kinerja	Kualitatif deskriptif	Kinerja pegawai secara umum baik dilihat dari produktivitas, kualitas pelayanan, tanggung jawab, dan akuntabilitas; namun responsivitas masih kurang; faktor penghambat: teknologi dan motivasi kerja	Penelitian ini berbeda karena tidak berfokus pada pelayanan administratif, melainkan pada kinerja kepolisian dalam menangani konflik sosial berupa tawuran pelajar yang memerlukan pendekatan preventif dan represif.

15	Kinerja Anggota Kepolisian Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Melalui 13 Komponen Penilaian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan - Shisca Agustina, Widhi Andika Darma dkk (2023)	Menganalisis kinerja anggota kepolisian serta strategi peningkatan kinerja di Ditreskrim Polda Sumatera Selatan	Teori manajemen kinerja, konsep motivasi, kemampuan, lingkungan kerja, serta strategi training dan non-training	Kualitatif deskriptif	Kinerja anggota kepolisian secara umum sudah memenuhi SOP, namun belum optimal karena masih banyak tugas belum terlaksana secara aktual	Penelitian terdahulu mengkaji kinerja kepolisian secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menyoroti kinerja dalam penanganan tawuran pelajar dengan analisis yang lebih kontekstual dan berbasis fenomena sosial.
16	Collaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal - Elok Prihatin (2020)	Menganalisis efektivitas kolaborasi antarinstansi dalam mengatasi kenakalan remaja.	Teori <i>Collaborative Governance</i>	Kualitatif deskriptif dengan wawancara dan studi dokumen.	Proses kolaboratif berjalan dengan cukup baik, namun, proses kolaboratif ini masih terdapat kendala dalam partisipasi	Penelitian terdahulu menekankan pada aspek kolaborasi antarinstansi, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kinerja internal kepolisian serta

					masyarakat dan swasta yang kurang aktif dalam kolaborasi.	bagaimana kolaborasi tersebut mempengaruhi efektivitas penanganan tawuran pelajar.
17	Role of Student Brawl and Delinquency Task Force in Managing Juvenile Delinquency in Sukabumi District - Muhammad Gian Ikhsan & Endang Danial (2020)	Menganalisis peran satuan tugas khusus dalam pencegahan kenakalan remaja.	Teori peran sosial	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam.	Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan kepolisian efektif menekan angka kenakalan siswa, meski belum menyentuh aspek pencegahan jangka panjang.	Penelitian ini mengembangkan kajian tidak hanya pada aspek peran atau kolaborasi, tetapi juga pada evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh dalam konteks penanganan kenakalan remaja.
18	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru	Menganalisis kinerja dan mengidentifikasi faktor penghambat kinerja Satpol PP dalam	Teori kinerja Agus Dwiyanto (2008) dengan indikator: produktivitas, kualitas layanan,	Kualitatif deskriptif	Kinerja Satpol PP masih kurang optimal, hambatan meliputi kurangnya SDM, sarana prasarana, dan	Penelitian terdahulu berfokus pada penertiban administratif, sedangkan penelitian ini mengkaji penanganan konflik sosial oleh

	- Ainun Zakiyah, Abdul Sadad (2023)	menertibkan PKL di Kota Pekanbaru	responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas		rendahnya kesadaran PKL	kepolisian dengan kompleksitas yang lebih tinggi, yaitu tawuran pelajar.
19	Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga Sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara Yang Baik - BY Alberthus, LM Metekohy, R Bakke (2022)	Menganalisis strategi kepolisian dalam menangani konflik sosial di masyarakat.	Teori peran kepolisian dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia) serta teori efektivitas organisasi publik.	Kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Kepolisian menerapkan strategi pre-emptif, preventif, dan represif; keberhasilan dipengaruhi oleh keaktifan patroli dan peran masyarakat dalam deteksi dini.	Penelitian ini memperluas analisis dengan mengaitkan strategi penanganan dengan dimensi kinerja organisasi dan faktor pendukungnya.

20	Implementasi Peranan Kepolisian dalam Mengatasi Kenakalan Remaja serta Hambatan-Hambatan yang Dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Hefer Yarmud Pandie, Debi F. Ng. Fallo & Darius A. Kian (2023)	Menganalisis implementasi peran kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi ²	Teori kenakalan remaja (juvenile delinquency) dan peran kepolisian dalam penegakan hukum	Empiris dengan analisis deskriptif kualitatif	Polres TTS menjalankan peran preventif dan edukatif melalui penyuluhan hukum di sekolah dan patroli rutin. Hambatan utama meliputi sarana yang terbatas, kurangnya kepercayaan masyarakat, serta lemahnya pengawasan orang tua.	Penelitian ini berbeda karena lebih fokus pada penanganan tawuran pelajar secara spesifik, termasuk analisis faktor penyebab, pola penanganan preventif dan represif, serta integrasi pendekatan hukum pidana dengan kondisi sosial di wilayah penelitian.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja kepolisian menunjukkan bahwa permasalahan kinerja aparat penegak hukum masih menjadi isu penting dalam pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nouvalsukma dkk. (2023) mengenai Penanganan Tawuran oleh Polsek Pasar Minggu dan Aripin dkk. (2023) tentang kualitas pelayanan Polres Tegal dalam penanganan tawuran pelajar memperlihatkan bahwa kinerja kepolisian masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek efisiensi dan daya tanggap. Keduanya menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta lemahnya koordinasi lintas pihak menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penanganan kasus tawuran pelajar. Sementara itu, Taufik dan Sulistyorini (2021) melalui penelitiannya tentang peran kepolisian dalam menyelesaikan tawuran antarwarga menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif, pre-emptif, dan represif memang efektif, namun keberhasilan di lapangan masih bergantung pada dukungan masyarakat dan kapasitas sumber daya aparat.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Prihatin (2020) tentang Collaborative Governance dalam mengatasi kenakalan remaja menambahkan perspektif penting bahwa kinerja lembaga penegak hukum juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan aparat dalam menangani masalah sosial, termasuk tawuran pelajar, tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarinstansi dan tingkat partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, dimensi kerja sama lintas sektor

merupakan bagian penting dalam menilai kinerja kepolisian, terutama dalam daerah yang memiliki karakteristik seperti Kabupaten Kendal.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, penelitian ini berupaya menilai bagaimana kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar dengan menggunakan teori kinerja organisasi publik dari Agus Dwiyanto (2006) yang mencakup dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Teori ini dipilih karena mampu memberikan kerangka yang jelas untuk menilai kinerja organisasi publik secara menyeluruh, khususnya dalam melihat sejauh mana pelayanan kepolisian berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori faktor pendukung dan penghambat kinerja menurut Hessel (2005) yang menyebutkan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu teknologi, kualitas input, lingkungan budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan SDM. Penggunaan teori ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi kinerja kepolisian, baik dari dalam organisasi maupun dari lingkungan eksternal.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang lebih komprehensif dan integratif. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kinerja kepolisian, tetapi juga mengkaji secara kritis hubungan antara dimensi kinerja dengan faktor pendukung dan penghambatnya dalam konteks penanganan tawuran pelajar. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menempatkan tawuran pelajar sebagai fenomena konflik sosial yang dinamis, sehingga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap kinerja kepolisian di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis

dalam pengembangan kajian kinerja organisasi publik, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan efektivitas dan responsivitas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dan organisasi publik mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Chandler dan Plano (1988) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya manusia, material, dan finansial untuk melaksanakan kebijakan publik yang dirancang demi kepentingan bersama. Dalam kerangka administrasi publik, kegiatan pemerintah tidak hanya mencakup pembuatan kebijakan tetapi juga implementasi yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Nicholas Henry (2010) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah perpaduan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Perkembangan paradigma administrasi publik telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk munculnya New Public Management (NPM) pada akhir abad ke-20. NPM menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi pasar dalam administrasi publik. Menurut Hood (1991), NPM ditandai dengan "dekomposisi organisasi publik yang besar menjadi unit-unit yang lebih kecil," "penekanan yang lebih besar pada output dan kinerja," dan "penggunaan mekanisme pasar" (Hood, 1991). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi juga terus

membentuk praktik administrasi publik modern. Di sisi lain, administrasi publik juga mencakup dimensi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Leonard White menegaskan bahwa administrasi publik tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif, di mana aspek moral dan etika menjadi bagian penting dalam pengelolaan kebijakan. melalui dua fokus yaitu manajemen publik dan kebijakan publik.

Manajemen Publik berfokus pada orientasi bagaimana cara mengatur dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Kebijakan Publik berfokus pada orientasi pembuatan peraturan atau hukum yang digunakan untuk menyelesaikan Paradigma governance muncul sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan publik dan keterbatasan model administrasi negara tradisional yang berpusat pada pemerintah. Stoker (1998) mendefinisikan governance sebagai keseluruhan lembaga dan aktor, di luar pemerintah tetapi termasuk di dalamnya, yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Governance melibatkan interaksi antara berbagai aktor dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut Borzel dan Risse (2005), governance merujuk pada struktur dan proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor-aktor negara dan non-negara. Aktor-aktor utama dalam governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hirst (2000) menekankan pentingnya kemitraan antara negara, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil dalam governance.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

1) The Politics-Administration Dichotomy (1900–1926)

Paradigma pertama ini dipelopori oleh tokoh seperti Woodrow Wilson dengan karyanya *The Study of Administration*, Frank J. Goodnow dalam *Politics and Administration*, serta Leonard D. White lewat *Introduction to the Study of Public Administration*. Wilson menekankan pemisahan antara ranah politik dan administratif. Goodnow dan White menyatakan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi utama: politik, yang mencakup pembuatan kebijakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif; serta administrasi, yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan oleh lembaga eksekutif. Paradigma ini meletakkan birokrasi sebagai pusat kajian, namun fokus ilmiahnya belum sepenuhnya jelas (Isnaini Rodiyah et al., 2021:27).

2) The Principles of Administration (1927–1937)

Paradigma kedua muncul lewat karya Willoughby *Principles of Public Administration* (1927), yang memperkenalkan gagasan bahwa administrasi publik memiliki prinsip universal yang dapat diterapkan lintas organisasi pemerintahan. Tokoh lainnya, seperti Luther Gulick dan Lyndall Urwick melalui *Papers on the Science of Administration*, menekankan prinsip-prinsip administratif sebagai bagian dari ilmu. Mereka mengembangkan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*), yang menunjukkan bahwa prinsip administrasi bisa diterapkan secara umum, baik dalam sektor publik maupun swasta.

3) Public Administration as Political Science (1950–1970)

Paradigma ketiga hadir sebagai kritik atas pemisahan politik dan administrasi. Herbert Simon menyampaikan bahwa pemisahan tersebut sulit dilakukan secara praktis. Ia juga menyoroti kelemahan prinsip administrasi yang bersifat terlalu umum dan kurang konsisten. Sebagai akibatnya, administrasi publik kembali diposisikan sebagai cabang dari ilmu politik, dengan fokus pada birokrasi dan analisis kebijakan. Meskipun demikian, penelitian dalam periode ini terbatas pada aspek teoritis dan analitis semata (Isnaini Rodiyah et al., 2021:28).

4) Public Administration as Administrative Science (1956–1970)

Sebagai respons terhadap kritik sebelumnya, paradigma keempat menekankan pendekatan ilmiah dan manajerial dalam administrasi publik. Tokoh-tokohnya seperti Keith M. Anderson, James G. March, dan Herbert Simon menekankan pentingnya hierarki dan organisasi dalam memahami kinerja otoritas. Administrasi publik dipelajari melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, ilmu manajemen, dan perilaku organisasi. Meskipun organisasi menjadi fokus utama, perdebatan tentang pemisahan antara administrasi publik dan sektor swasta tetap berlangsung.

5) Public Administration as Public Administration (1971–sekarang)

Paradigma kelima mengukuhkan administrasi publik sebagai disiplin ilmiah yang berdiri sendiri. Teori organisasi dan teknik manajerial menjadi landasan penting dalam perkembangan pendekatan ini. Di era ini, lahir spesialisasi baru seperti *comparative public administration* yang

membandingkan praktik administrasi di berbagai negara. Nicholas Henry mendorong integrasi antara teori organisasi dan ilmu manajemen untuk fokus pada isu-isu publik (Beddy Iriawan Maksudi, 2017:262–263).

6) Governance (1990–sekarang)

Paradigma *governance* menandai pergeseran peran pemerintah dari pelaku tunggal menjadi bagian dari jaringan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Sejak akhir 1980-an, pendekatan ini menekankan partisipasi publik dan integrasi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak sosial, ekonomi, dan institusional (Tamayao, 2014). Tidak seperti pendekatan tradisional yang bersifat top-down, tata kelola modern mendorong masyarakat untuk aktif dalam kebijakan publik (Ikeanyibe, 2016). Konsep ini menekankan bahwa pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk organisasi nirlaba dan perusahaan swasta, untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik (Stoker, 1998; Wu & He, 2009; Ewalt, 2001; Gibson, 2011

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar ditempatkan dalam paradigma *governance*, di mana keberhasilan institusi publik tidak hanya diukur dari kemampuan internal organisasi, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu berinteraksi, berkolaborasi, dan merespons kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Polres Kendal dipandang bukan sekadar pelaksana penegakan hukum, tetapi juga sebagai aktor pelayanan publik yang berperan dalam menjaga ketertiban sosial melalui sinergi dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Pendekatan governance memandang penanganan tawuran pelajar sebagai isu bersama yang memerlukan partisipasi berbagai pihak, bukan hanya tindakan represif dari kepolisian. Oleh karena itu, efektivitas Polres Kendal dalam menekan fenomena tawuran juga bergantung pada keterbukaan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, paradigma governance memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menilai kinerja Polres Kendal secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari proses kolaboratif dan responsivitas sosialnya.

1.6.4 Manajemen Publik

Manajemen publik berarti manajemen yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik. Menurut Overman dalam Keban (2008:85) mengatakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management”. Manajemen publik bukanlah “policy analysis” bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “rational-instrumental” pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Berdasarkan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafritz (1991: xi) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata manajemen publik merupakan proses penggerak SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Manajemen publik seringkali disebut dengan manajemen pemerintah karena secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen menjadi salah satu unsur yang penting dalam sebuah penyelenggaraan organisasi. Pendekatan manajerialisme memuat fungsi-fungsinya strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik dan pembuatan program yang harus dilakukan oleh seorang manajer publik. Pada sektor publik manajerialisme berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang bersifat pemenuhan jangka panjang. Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu:

1. Fungsi strategi, meliputi:

- a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
- b) membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:

- a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
- b) pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
- c) pengendalian kinerja.

3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:

- a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
- b) Hubungan dengan organisasi lain;
- c) Hubungan dengan pers dan publik.

Dalam hal pelayanan publik yang lebih spesifik, salah satu bidang penerapan manajemen publik yang strategis adalah pada sektor transportasi, khususnya manajemen lalu lintas. Bidang ini menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat dan terbatasnya kapasitas infrastruktur di perkotaan. Manajemen lalu lintas merupakan cabang dari manajemen transportasi yang fokus pada pengaturan dan pengendalian arus kendaraan, dengan tujuan menciptakan sistem lalu lintas yang aman, efisien, dan berkelanjutan, tanpa harus selalu membangun infrastruktur baru secara besar-besaran.

1.6.5 Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Disebutkan juga dalam Pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkup administrasi modern, pelayanan publik menjadi salah satu aspek fundamental. Menurut Denhardt dan Denhardt (2003) dalam konsep *New Public Service*, pemerintah tidak lagi semata-mata bertindak sebagai pengendali, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung partisipasi aktif masyarakat. Pelayanan publik yang efektif menuntut adanya responsivitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan. Pelayanan publik bukan hanya sekadar memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat, melainkan juga membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan administrasi publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola hubungan komunikasi dengan masyarakat secara efektif. Dalam hal ini, komunikasi publik menjadi jantung dari penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.6.6 Kinerja

Menurut Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004 : 192) mengartikan kinerja sebagai *“the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period”*. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai

Agus Dwiyanto (2006) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa

besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006). Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat, dan lebih mampu mengukur kinerja Polres Kendal dalam penanganan tawuran pelajar. Indikator

pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50) meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

1.6.7 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Pada Sektor Publik

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kinerja organisasi, baik organisasi publik maupun swasta. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penjelas tingkat capaian kinerja, tetapi juga menjadi kerangka analitis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti dapat menelusuri aspek-aspek internal organisasi yang mendorong peningkatan kinerja, sekaligus mengungkap kendala struktural, kultural, maupun manajerial yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

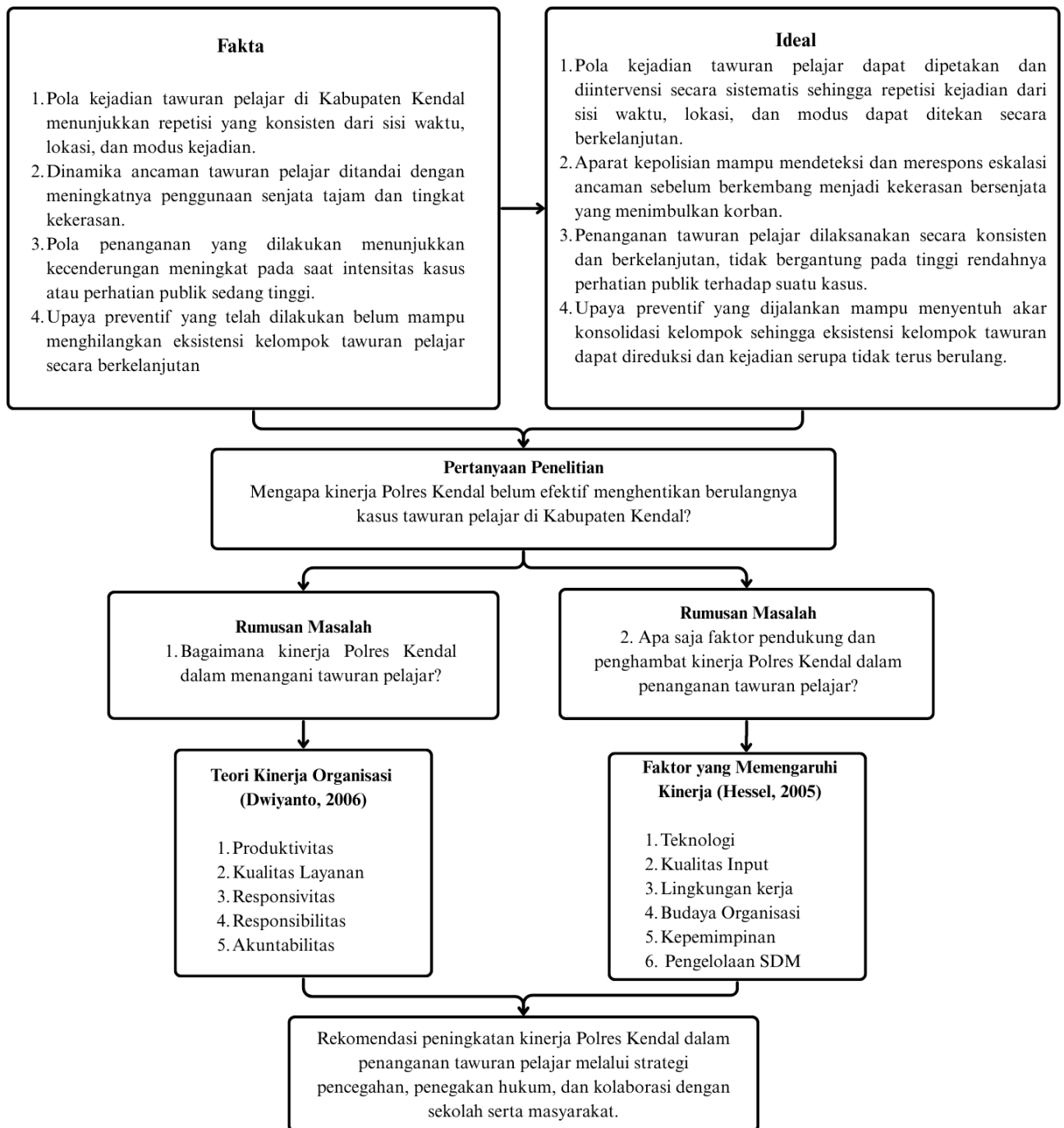
Secara lebih rinci, Ruky (dalam Hessel, 2005: 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan tingkat pencapaian kinerja organisasi, yang dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk mengklasifikasikan faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut
- b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan

- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya

1.6.8 Kerangka Teori

Kinerja Polres Kendal dalam Menangani Kasus Tawuran Pelajar di Kabupaten Kendal



Fenomena tawuran pelajar di Kabupaten Kendal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang berulang dan eskalasi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan rekapitulasi pemberitaan media periode 2018–2025, kejadian tawuran tidak hanya terjadi secara konsisten dari sisi waktu dan lokasi, tetapi juga menunjukkan peningkatan tingkat kekerasan yang ditandai oleh penggunaan senjata tajam dan munculnya korban jiwa. Di sisi lain, penanganan yang dilakukan aparat kepolisian belum menunjukkan konsistensi yang stabil, dan upaya preventif yang telah dijalankan belum mampu menghilangkan eksistensi kelompok-kelompok tawuran secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara fakta di lapangan dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Secara ideal, pola kejadian tawuran seharusnya dapat dipetakan dan diintervensi secara sistematis sehingga repetisinya dapat ditekan; eskalasi ancaman seharusnya dapat dideteksi dan direspons sebelum berkembang menjadi kekerasan bersenjata; penanganan seharusnya dilaksanakan secara konsisten tanpa bergantung pada tekanan publik; dan upaya preventif seharusnya mampu menyentuh akar konsolidasi kelompok sehingga tawuran tidak terus berulang. Kesenjangan antara fakta dan kondisi ideal inilah yang memunculkan pertanyaan penelitian: “Mengapa kinerja Polres Kendal belum efektif menghentikan berulangnya kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal?”

Pertanyaan tersebut dijabarkan ke dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar? Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerja tersebut? Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menggunakan teori kinerja

organisasi publik Dwiyanto (2006) yang mencakup lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, digunakan kerangka faktor yang memengaruhi kinerja organisasi menurut Hessel (2005) yang meliputi teknologi, kualitas input, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Analisis terhadap kedua rumusan masalah tersebut diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan kinerja Polres Kendal, serta rekomendasi peningkatan kinerja dalam penanganan tawuran pelajar melalui strategi pencegahan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan sekolah serta masyarakat.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Produktivitas

Produktivitas menurut Dwiyanto (2006) dilihat dari sejauh mana organisasi publik mampu menghasilkan output sesuai tujuan. Dalam penelitian ini, indikator produktivitas dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Jumlah kasus tawuran pelajar yang berhasil ditangani setiap tahun.
2. Jumlah kegiatan preventif (penyuluhan, patroli sekolah, sosialisasi).
3. Perbandingan jumlah kasus tawuran yang terjadi dengan kasus yang dapat dicegah.

1.7.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan berkaitan dengan persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Indikatornya dalam penelitian ini:

1. Persepsi masyarakat, guru, dan pelajar terhadap pelayanan kepolisian.
2. Ketersediaan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut laporan warga.
3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan kasus tawuran.

1.7.3 Responsivitas

Responsivitas menunjukkan daya tanggap kepolisian dalam merespons laporan masyarakat. Indikatornya:

1. Waktu respons polisi dari laporan ke lokasi kejadian.
2. Jumlah quick response terhadap kasus viral di media sosial.
3. Tingkat keterlibatan polisi dalam mediasi antar sekolah atau kelompok pelajar.

1.7.4 Responsibilitas

Responsibilitas berarti kesesuaian kinerja dengan norma hukum dan SOP. Indikatornya:

1. Kepatuhan terhadap SOP penanganan anak/remaja (UU Perlindungan Anak, *restorative justice*).
2. Transparansi proses penyidikan dan pelaporan resmi.
3. Proporsionalitas sanksi yang diberikan agar tidak melanggar hak anak.

1.7.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas diukur dari tanggung jawab dan keterbukaan aparat kepada publik. Indikatornya:

1. Keterbukaan informasi Polres Kendal mengenai data kasus tawuran.
2. Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan kepolisian pusat.
3. Pengawasan eksternal melalui KPAI atau lembaga masyarakat.

1.7.6 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja

1. Teknologi
 - Pemanfaatan CCTV, media sosial, dan sarana komunikasi.
 - Ketersediaan kendaraan patroli dan alat komunikasi.
2. Kualitas Input/SDM
 - Jumlah personel Satreskrim/Satbinmas yang menangani pelajar.
 - Kompetensi aparat dalam pendekatan humanis terhadap remaja.
3. Lingkungan Fisik
 - Kondisi sarana prasarana kantor Polres/Polsek.
 - Aksesibilitas lokasi rawan tawuran.
4. Budaya Organisasi
 - Pola kerja preventif atau represif dalam penanganan kasus.
 - Komitmen aparat menjunjung pendekatan pembinaan pelajar.

5. Kepemimpinan

- Peran Kapolres dalam mengarahkan strategi penanganan tawuran.
- Prioritas pimpinan pada isu keamanan remaja.

6. Pengelolaan SDM

- Sistem rotasi, promosi, dan insentif bagi personel.
- Kerja sama dengan pihak sekolah dalam pembinaan remaja.

Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

Rumusan Masalah	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
1. Bagaimana kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal?	Produktivitas	Penanganan kasus tawuran	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kasus tawuran pelajar yang berhasil ditangani setiap tahun.- Jumlah kegiatan preventif (patroli, sosialisasi sekolah, penyuluhan).- Perbandingan jumlah kasus yang terjadi dengan jumlah yang dapat dicegah.
	Kualitas Layanan	Kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Persepsi orang tua, guru, dan siswa terhadap pelayanan Polres.- Ketersediaan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut laporan.- Tingkat rasa aman masyarakat setelah intervensi kepolisian.

	Responsivitas	Kecepatan respons	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tanggap aparat dari laporan ke lokasi kejadian. - Jumlah <i>quick response</i> terhadap laporan masyarakat/viral di media sosial. - Keterlibatan dalam mediasi antar sekolah atau kelompok pelajar.
	Responsibilitas	Kepatuhan aturan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian penanganan dengan SOP dan UU Perlindungan Anak. - Transparansi prosedur penyidikan kasus. - Proporsionalitas sanksi bagi pelajar terlibat tawuran.
	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban publik	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi data tahunan kasus tawuran. - Laporan kinerja kepada Pemkab dan kepolisian pusat. - Adanya pengawasan eksternal (KPAI, LSM pendidikan).
2. Faktor apa saja yang memengaruhi kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar?	Teknologi	Dukungan sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan CCTV, media sosial, dan call center 110 untuk deteksi. - Sarana patroli (kendaraan, alat komunikasi).

	Kualitas Input/SDM	Personel dan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah personel Satreskrim/Satbinmas khusus pelajar. - Kompetensi aparat dalam pendekatan humanis ke remaja.
	Lingkungan Fisik	Sarana prasarana kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kantor Polres/Polsek. - Aksesibilitas ke lokasi rawan tawuran (jalan tembus, area publik).
	Budaya Organisasi	Orientasi kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah orientasi lebih represif atau preventif. - Komitmen Polres untuk pendekatan pembinaan terhadap pelajar.
	Kepemimpinan	Peran Kapolres	<ul style="list-style-type: none"> - Arahkan Kapolres dalam kebijakan penanganan tawuran. - Strategi prioritas keamanan remaja di tingkat Polres dan Polsek.
	Pengelolaan SDM	Motivasi dan pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Rotasi personel, pemberian penghargaan, dan sanksi. - Koordinasi dengan sekolah dan dinas pendidikan dalam pembinaan pelajar.

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan urgensi permasalahan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal yang semakin meningkat dan belum dapat diatasi secara optimal meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh aparat kepolisian maupun pihak sekolah. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa tawuran tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi pelajar yang terlibat, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Tingginya angka kasus, meluasnya keterlibatan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA, serta penggunaan senjata tajam menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat serius dan membutuhkan kajian mendalam mengenai kinerja pihak berwenang dalam penanganannya.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006). Teori ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai kinerja lembaga publik, khususnya Polres Kendal, melalui lima dimensi utama: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dengan menggunakan kerangka ini, penilaian terhadap kinerja tidak hanya terbatas pada hasil akhir berupa jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga mencakup proses pelayanan, respons terhadap kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan aturan hukum, serta pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki argumen bahwa efektivitas penanganan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal tidak dapat hanya dilihat dari segi tindakan represif semata, melainkan harus dianalisis melalui perspektif kinerja organisasi publik secara menyeluruh. Penggunaan teori Dwiyanto diharapkan

mampu menjelaskan sejauh mana kinerja Polres Kendal dalam mencegah, menangani, dan menindaklanjuti kasus tawuran pelajar, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sejalan dengan itu, Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang ingin menggambarkan kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendalami aspek-aspek kinerja organisasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2006), yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi berdasarkan Hessel (2005), seperti teknologi, kualitas input, budaya organisasi, kepemimpinan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini tidak hanya

bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tawuran pelajar secara faktual, tetapi juga menganalisis sejauh mana Polres Kendal mampu menjalankan perannya dalam penanganan kasus tersebut.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada Polres Kendal sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan langsung dalam penanganan kasus tawuran pelajar. Kabupaten Kendal dipilih karena dalam beberapa tahun terakhir marak terjadi kasus tawuran yang melibatkan pelajar SMP maupun SMA, bahkan beberapa kasus menimbulkan korban jiwa maupun luka serius. Fenomena ini menjadikan Kendal sebagai salah satu daerah dengan eskalasi konflik pelajar yang tinggi di Jawa Tengah dan menuntut perhatian serius dari aparat kepolisian.

Secara geografis, Kabupaten Kendal memiliki wilayah strategis yang dilalui jalur pantura dan dekat dengan Kota Semarang, sehingga mobilitas pelajar cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok remaja. Beberapa titik rawan, seperti kawasan Kaliwungu, Sukorejo, hingga Patebon, sering diberitakan menjadi lokasi terjadinya tawuran pelajar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa problem tawuran di Kendal tidak hanya merupakan isu internal sekolah, tetapi juga menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat luas.

Dengan latar belakang tersebut, Polres Kendal dipandang sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam mengelola dinamika sosial ini, baik melalui tindakan preventif seperti penyuluhan dan patroli sekolah, maupun langkah represif berupa penindakan terhadap pelaku tawuran. Oleh karena itu, situs penelitian ini

dipilih agar penelitian mampu memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai kinerja aparat kepolisian dalam menghadapi fenomena tawuran pelajar di daerah tersebut.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memastikan bahwa informan yang dipilih benar-benar memiliki keterlibatan langsung serta relevansi dengan penanganan kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menetapkan informan utama yang memiliki otoritas, pengetahuan, dan pengalaman mendalam dalam proses penanganan tawuran. Dalam hal ini, informan utama terdiri atas pejabat struktural dan fungsional di Polres Kendal, seperti Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas), dan Kepala Unit Samapta, yang memiliki tanggung jawab langsung dalam strategi preventif maupun represif terkait tawuran pelajar.

Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jangkauan informan berdasarkan rekomendasi dari narasumber awal. Melalui cara ini, peneliti memperoleh tambahan informan dari pihak eksternal yang juga memiliki relevansi, yaitu pelajar yang pernah terlibat tawuran, guru, dan masyarakat.

Tabel 1. 5 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Satuan Reserse Kriminal	Bertanggung jawab atas penanganan kasus tawuran pelajar dari aspek penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengungkapan pelaku, barang bukti, serta penerapan hukum pidana. Mengetahui kendala teknis dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran.	1 Orang
2	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan	Berperan dalam deteksi dini, pengumpulan informasi, pemetaan potensi konflik, dan analisis ancaman terkait tawuran pelajar. Mengetahui pola pergerakan kelompok remaja serta peran intelijen dalam pencegahan tawuran.	1 Orang
3	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat	Bertanggung jawab pada kegiatan pencegahan dan pembinaan, seperti penyuluhan ke sekolah, pembinaan remaja, dan kerja sama dengan masyarakat serta institusi pendidikan untuk menekan potensi tawuran.	1 Orang
4	Kepala Satuan Samapta	Bertugas dalam pengamanan dan respons cepat terhadap gangguan kamtibmas, termasuk patroli, pengendalian massa, serta penanganan langsung di lokasi saat tawuran pelajar terjadi.	1 Orang
5	Kepala Satuan Lalu Lintas	Berperan dalam pengamanan jalan raya dan pengaturan lalu lintas saat terjadi tawuran, terutama karena banyak tawuran berlangsung di ruas jalan umum. Mengetahui dampak tawuran terhadap keselamatan pengguna jalan.	1 Orang

6	Kepala Bagian Operasi	Bertanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian, dan koordinasi operasional penanganan tawuran pelajar lintas satuan fungsi di Polres Kendal. Mengetahui strategi dan sinergi internal kepolisian dalam penanganan kasus.	1 Orang
7	Pelaku Tawuran	Menjadi informan kunci untuk memperoleh perspektif langsung pelaku, meliputi latar belakang keterlibatan, motif, pola tawuran, serta respons terhadap tindakan kepolisian.	1 Orang
8	Pihak Sekolah	Memberikan informasi terkait kondisi pelajar, potensi konflik di lingkungan sekolah, serta bentuk pembinaan dan koordinasi dengan kepolisian dalam pencegahan tawuran pelajar.	1 Orang
9	Masyarakat	Memberikan perspektif terkait kondisi keamanan lingkungan, pengalaman menghadapi tawuran pelajar, serta penilaian terhadap kehadiran dan kinerja aparat kepolisian di lapangan.	1 Orang

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi narasi lisan, tindakan aparat, hasil observasi lapangan, serta dokumen tertulis yang berkaitan dengan penanganan kasus tawuran pelajar oleh Polres Kendal. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai proses pencegahan, penindakan, serta dampak dari strategi kepolisian dalam menangani tawuran pelajar di Kabupaten Kendal.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan subjek atau peristiwa yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara semi-terstruktur dengan pejabat struktural Polres Kendal, untuk mengetahui strategi, kendala, serta kinerja dalam penanganan tawuran pelajar.
- b. Wawancara mendalam dengan pelaku yang terlibat tawuran untuk menangkap persepsi secara langsung mengenai kinerja kepolisian dan dampaknya bagi lingkungan sosial.
- c. Observasi non-partisipatif pada kegiatan preventif (penyuluhan, patroli sekolah) dan represif (penanganan kasus di lapangan) yang dilakukan aparat, untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan secara faktual.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis yang mendukung serta memperkaya konteks analisis, seperti:

- a. Dokumen internal Polres Kendal (SOP penanganan anak/remaja, laporan tahunan, notulen rapat koordinasi).
- b. Data statistik kriminal terkait jumlah kasus tawuran pelajar di Kendal beberapa tahun terakhir.

- c. Peraturan perundang-undangan yang relevan (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Kepolisian, serta aturan mengenai *restorative justice*).
- d. Artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media mengenai fenomena tawuran pelajar di Kendal dan Jawa Tengah.

Kombinasi data primer dan sekunder tersebut digunakan untuk membangun pemahaman yang utuh serta melakukan triangulasi informasi dalam proses analisis dan interpretasi data penelitian ini.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik utama yang disesuaikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, guna memperoleh informasi secara mendalam, kontekstual, dan menyeluruh mengenai kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar.

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta penilaian para informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanganan kasus tawuran pelajar. Menurut Patton (2002), wawancara merupakan metode efektif untuk mengeksplorasi opini, pengalaman, dan persepsi informan terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberi fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam. Informan utama meliputi pejabat struktural di Polres Kendal.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan tujuan mencatat secara langsung aktivitas dan kondisi di lapangan terkait strategi pencegahan dan penindakan tawuran pelajar oleh aparat kepolisian. Menurut Nasution (2003), observasi memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara utuh melalui pengamatan langsung terhadap situasi nyata. Fokus observasi dalam penelitian ini meliputi kegiatan penyuluhan yang dilakukan Satbinmas di sekolah-sekolah, patroli polisi di titik rawan tawuran seperti Kaliwungu dan Sukorejo, serta pola penanganan aparat ketika terjadi insiden tawuran. Observasi ini memberikan gambaran faktual tentang implementasi strategi preventif maupun represif yang dijalankan Polres Kendal.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis, baik berupa dokumen resmi maupun publikasi lain yang relevan. Bowen (2009) menekankan bahwa dokumen berperan penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memperkuat triangulasi dan memperkaya konteks analisis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan Polres Kendal terkait kasus kriminalitas remaja, SOP penanganan anak dan remaja berhadapan dengan hukum, notulen rapat koordinasi Polres dengan pihak sekolah atau pemerintah daerah, data statistik kasus tawuran pelajar di Kendal, serta pemberitaan media massa mengenai eskalasi tawuran pelajar di wilayah tersebut.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik utama yang disesuaikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, guna memperoleh informasi secara mendalam, kontekstual, dan menyeluruh mengenai kinerja Polres Kendal.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan, dan berlangsung secara terus-menerus hingga tahap akhir penelitian.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap ini melibatkan kegiatan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengkodean, kategorisasi, dan pengelompokan data berdasarkan dimensi kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (2006) produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi menurut Hessel (2005), seperti teknologi, kualitas SDM, budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi yang sudah dipilah, serta mendukung proses interpretasi lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data disusun dalam bentuk deskriptif kualitatif yang dilengkapi tabel, matriks, atau bagan bila diperlukan, sehingga gambaran mengenai strategi penanganan, efektivitas tindakan preventif maupun represif, serta respons masyarakat terhadap kinerja Polres Kendal dapat dipahami secara lebih jelas.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan makna dari data yang telah dianalisis untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan sementara. Selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan sementara tersebut terus diuji dan diverifikasi dengan cara merujuk kembali pada data empiris di lapangan. Triangulasi dilakukan antar sumber data (polisi, sekolah, orang tua, masyarakat), antar teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan melalui perbandingan dengan teori yang digunakan. Hasil akhirnya adalah kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai mengapa tawuran pelajar masih marak terjadi meskipun Polres Kendal telah melakukan berbagai upaya penanganan, serta bagaimana faktor-faktor internal maupun eksternal memengaruhi kinerja kepolisian dalam konteks ini.

1.9.7 Kualitas Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk menjaga kredibilitas dan integritas ilmiah dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif sering kali dikritik karena dianggap tidak sistematis atau subjektif, sehingga diperlukan strategi validasi yang ketat agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Hwa, 2011). Oleh karena itu, dalam penelitian ini keabsahan data diuji melalui empat indikator utama, yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Moleong, 2017).

a. Kredibilitas

Kredibilitas mengacu pada tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, kredibilitas dijaga dengan memilih informan yang relevan, yaitu pejabat Polres Kendal. Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan di titik rawan tawuran (seperti Kaliwungu, Sukorejo, Patebon), serta dokumen resmi berupa laporan kepolisian dan pemberitaan media. Peneliti juga melakukan *member check* dengan informan utama untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat sesuai dengan maksud narasumber.

b. Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini memberikan deskripsi yang detail mengenai kondisi sosial pelajar di Kendal, faktor pemicu tawuran, serta kinerja kepolisian dalam

menanganinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi fenomena tawuran pelajar, khususnya kabupaten/kota di jalur pantura Jawa Tengah yang memiliki mobilitas pelajar tinggi dan karakteristik sosial yang mirip.

c. Dependabilitas

Dependabilitas berhubungan dengan konsistensi hasil penelitian apabila dilakukan ulang. Untuk memastikan dependabilitas, penelitian ini disusun secara sistematis sejak tahap perumusan masalah, pemilihan subjek, teknik pengumpulan data, hingga analisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Seluruh proses dicatat dalam log penelitian (catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi), sehingga dapat ditelusuri dan direplikasi oleh peneliti lain apabila dilakukan dalam konteks yang serupa.

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian benar-benar bersumber dari data lapangan, bukan dari asumsi subjektif peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menjaga objektivitas dengan menyimpan rekaman wawancara, dokumentasi observasi, serta mengorganisasi data dalam kategori tematik sesuai teori Dwiyanto (2006) dan Hessel (2005). Setiap kesimpulan yang ditarik selalu dikaitkan dengan bukti empiris, baik berupa testimoni informan maupun dokumen resmi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bebas dari bias pribadi.